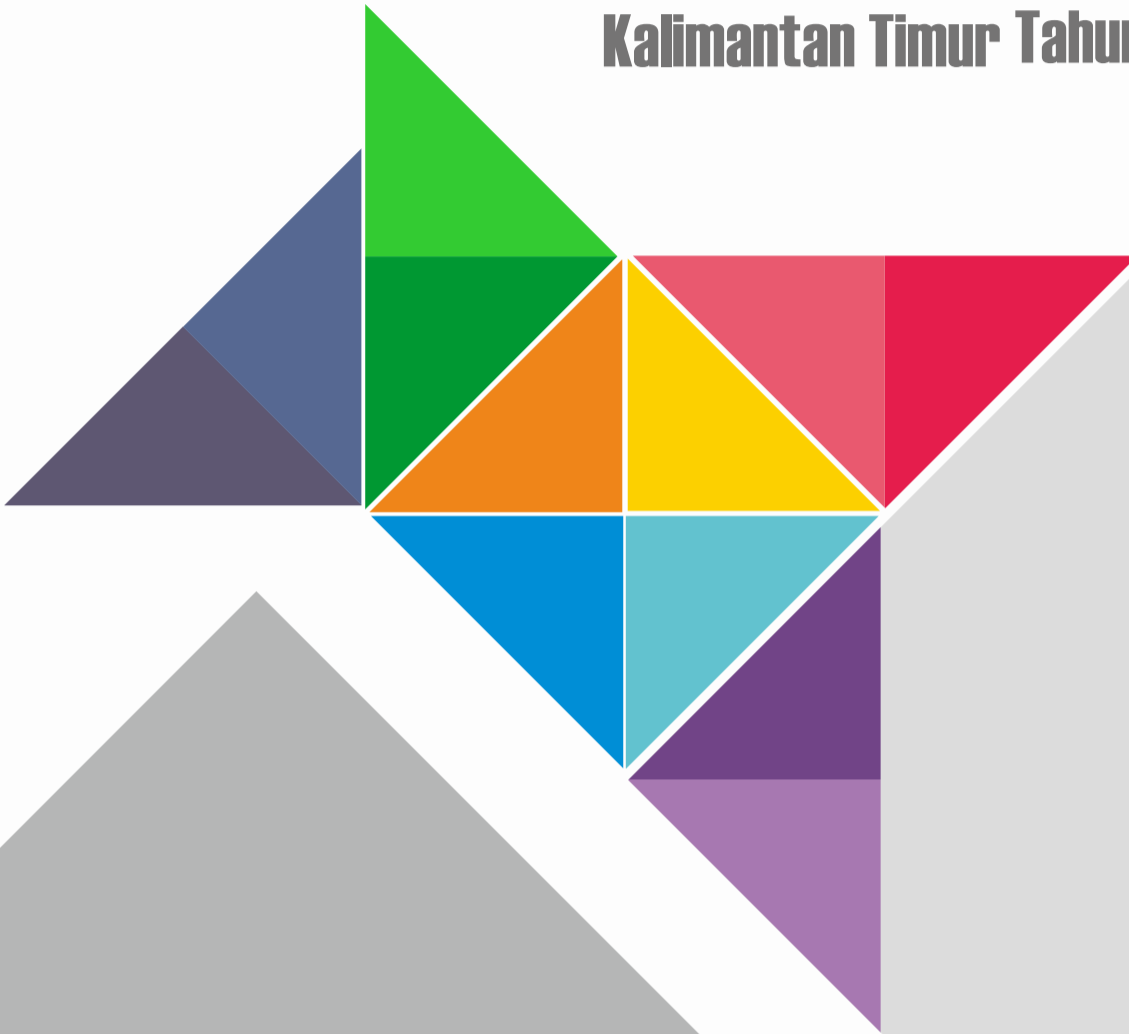


RENCANA KERJA

Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021



**Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur**

KATA PENGANTAR

Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah baik antar Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk pencapaian akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi.

Berkenan dengan hal tersebut, sebagai tahapan awal maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rancangan awal usulan program kegiatan prioritas sesuai tupoksi yang diemban oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara keseluruhan, beserta alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2021.

Besar harapan agar Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini dapat disetujui sebagai dasar usulan alokasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Maret 2020

Pt. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD SA'BANI
Pembina Utama Madya
NIP. 19620128 198803 1 005

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Layanan Setda Prov. Kaltim | 24 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda Prov Kaltim..... | 27 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD | 27 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 28 |
| BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM | |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 29 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Setda Prov. Kaltim..... | 30 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 31 |
| BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SETDA PROV. KALTIM | |
| Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah | 32 |
| BAB V : PENUTUP | |
| 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja | 42 |
| 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan | 42 |
| 5.3 Rencana Tindak Lanjut | 43 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Selanjutnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 30, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 131 sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) diatur bahwa Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan rancangan akhir;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan;

Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah dan rancangan akhir RKPD. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Kalimantan Timur berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023.

Dengan melihat hal tersebut, maka diharapkan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi komitmen bersama guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, serta menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas–prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini adalah untuk menjabarkan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat Daerah , proses penyusunan Renja Sekretariat , keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah .

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Sekretariat Daerah serta susunan garis besar dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun yang lalu, dan/atau realisasi APBD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap IKK.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, meliputi tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi misi, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah .

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antar rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kaitannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2021.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan tahun 2021, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2020, dapat dilihat dalam tabel 2.1 pada lampiran dibawah ini.

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjnt / Solusi |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|--|--|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah | | | | | | Rp 681.700.000 | | | Masalah persamaan persepsi terkait isian data IKK dan ketersediaan data dukung yang kadang masih terdapat perbedaan antara tim daerah dan tim nasional LPPD, utamanya terkait data dukung yang tidak bisa diterima | Kemendagri melakukan pembekalan kepada tim daerah sebelum melakukan EKKPD kepada Kab/Kota dalam rangka persamaan persepsi terkait pengisian IKK beserta data dukung IKK yang memenuhi syarat untuk bisa diterima sebagai data dukung |
| | Persentase kab/kota yang memiliki predikat LPPD "ST" | Persentase | 50% | 50% | 100% | | | | | Melakukan pra evaluasi kinerja melalui asistensi kepada perangkat daerah untuk pemahaman IKK |
| Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kab/Kota yang menyusun dokumen LPPD sesuai ketentuan | Dokumen | 1 | 1 | 100% | Rp 681.700.000 | 681.263.017 | 99,94 | | |
| Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | Persentase pelayanan KDH sesuai SOP | Persentase | 100% | 100% | 100% | Rp 629.000.000 | | | | |
| Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota | Jumlah fasilitasi kegiatan KDH | Kegiatan | 100 | 100% | 100% | Rp 629.000.000 | 621.173.520 | 98,76 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjutt / Solusi | |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 | |
| Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah | | | 100% | 100% | | | | | | |
| | Persentase | | 100% | | | Rp 1.124.800.000 | | | | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | Kab/Kota | 2 | 2 | 100% | Rp 1.124.800.000 | 1.120.675.150 | 99,63 | | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Publik | Persentase OPD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai standar | Persentase | | | | | | | | | |
| Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Jumlah Dokumen monev SPM | Dokumen | | | | | | | | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjutt / Solusi |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Persentase tapal batas wilayah Kab/kota yang ditetapkan | Persentase | 100% | 100% | 100% | Rp 1.402.500.000 | 1.381.133.204 | 98,48 | | |
| Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan | Dokumen Perencanaan Penataan Administrasi Pemda yang tersusun | Dokumen | 1 | 1 | 100% | Rp 348.250.000 | 346.938.510 | 99,62 | | |
| Pembakuan nama rupabumi | Dokumen Nama Rupabumi yang di Bakukan | Dokumen | 1 | 1 | 100% | Rp 336.650.000 | 332.146.450 | 98,66 | | |
| Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah | Total panjang batas yang ditegaskan | | 5 | 5 | 100% | Rp 717.600.000 | 702.048.244 | 97,83 | | |
| Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan | Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti | Persentase | 100% | 100% | 100% | Rp 1.264.250.000 | 1.254.619.702 | 99,24 | | |
| Penataan Masalah Pertanahan Pembinaan Kamtibmas | Jumlah fasilitasi Masalah Pertanahan | Kegiatan | 1 | 1 | 100% | Rp 527.850.000 | 520.727.502 | 98,65 | | |
| | Jumlah orang/organisasi kemasyarakatan di Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Kamtibmas | Kab/Kota | 10 | 10 | 100% | Rp 736.400.000 | 733.892.200 | 99,66 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjnt / Solusi |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|--|---|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi | Persentase rancangan peraturan yang menjadi produk hukum | Persentase | 75% | 99,70% | 133% | Rp 682.000.000 | 665.543.226 | 98% | Lemahnya pengetahuan SKPD dalam penyusunan draft produk hukum yang tidak sesuai dengan tata naskah hukum | Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum kepada SKPD |
| Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Evaluasi Peraturan Gubernur | Jumlah dokumen Rapergub dan Kepgub yang disusun | Dokumen | 600 | 675 | 88,89% | Rp 682.000.000 | 665.543.226 | 97,59 | | |
| Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah | Persentase usulan Perda yang sudah memiliki naskah akademik | Persentase | 75% | 100% | 133% | Rp 1.031.000.000 | 1.016.392.926 | 99% | | |
| Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi | Peraturan daerah yang di tetapkan (perda) | Dokumen | 10 | 10 | 100% | Rp 1.031.000.000 | 1.016.392.926 | 98,58 | | |
| Program Identifikasi dan evaluasi Produk Hukum | Persentase Produk Hukum yang diterapkan (perda) | Persentase | | | | | | | | |
| Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan | Jumlah Dokumen Perda yang dikaji dan evaluasi | Dokumen | 0 | | | | | | | |
| Program Pelayanan Bantuan Hukum | Persentase Perkara/Kasus Sengketa Pemerintah Provinsi yang terselesaikan tepat waktu | Persentase | 90% | | | Rp 2.510.000.000 | 1.647.430.744 | 65,63 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjutt / Solusi |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Peningkatan Palayanan Bantuan Hukum | Jumlah PD yang mendapat bantuan hukum | PD | 10 | 7 | 70% | Rp 2.150.000.000 | 1.312.177.679 | 61,03 | | |
| Peningkatan Penyelesaian Sengketa | Kepuasan masyarakat terhadap kepastian hukum penyelesaian perkara dengan cepat | Presentase | 90% | 90% | 100% | Rp 360.000.000 | 335253065 | 93,13 | | |
| Program Peningkatan | Persentase Kab/Kota yang memiliki | Persentase | 80% | | | Rp 370.000.000 | 523.968.957 | 94,41 | | |
| Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM | Jumlah Dokumen rencana aksi HAM | Dokumen | 10 | 10 | 100% | Rp 370.000.000 | 523.968.957 | 94,41 | | |
| Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Persentase Informasi Hukum yang terdokumentasi dengan baik | Persentase | 60% | | | Rp 290.000.000 | 285.314.084 | 98,38 | | |
| Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah | Jumlah Informasi Hukum yang dipublikasi | Informasi | 600 | 685 | 114% | Rp 290.000.000 | 285.314.084 | 98,38 | | |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah | Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan produk hukum provinsi | Persentase | 79% | | | Rp 1.904.300.000 | 1.832.316.701 | 96,22 | | |
| Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota | Jumlah Produk Perda dan Perkada yang dievaluasi tepat waktu | | 250 | 400 | 160% | Rp 1.904.300.000 | 1.832.316.701 | 96,22 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjnt / Solusi | |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---|--|---|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 | |
| Program Penguatan Kelembagaan | Prosentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) | Persentase | 87% | 100% | 114,94 | Rp 1.730.120.000 | Rp 1.604.339.293 | 92,73 | Belum terdokumentasinya dokumen pendukung evaluasi kematangan Organisasi dengan baik. | Melakukan Sosialisasi/Asistensi pelaksanaan penataan dan Organisasi Daerah | Fasilitasi/Asistensi Evaluasi Kelembagaan Kematangan Perangkat Daerah |
| Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi/evaluasi kelembagaan | PD | 38 | 38 | 100 | Rp 599.960.000 | Rp 545.575.443 | 90,94 | Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami secara baik tentang pelaksanaan Evaluasi Kematangan organisasi | | |
| Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penguatan kelembagaan | Kab/Kota | 10 | 10 | 100 | Rp 231.000.000 | Rp 210.191.600 | 90,99 | | | |
| Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | - Dokumen Analisis Jabatan yang disusun - Dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 899.160.000 | Rp 848.572.250 | 94,37 | | | |
| Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan | Persentase | 60,53% | 65,79% | 108,70 | Rp 300.760.000 | Rp 265.008.900 | 88,11 | | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjnt / Solusi |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan | Jumlah SOP perangkat daerah yang diverifikasi | SOP | 1840 | 4183 | 227,336957 | Rp 300.760.000 | Rp 265.008.900 | 88,11 | | |
| Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja Sesuai Ketentuan | Persentase | 79% | 100% | 126,666667 | Rp 2.974.660.000 | Rp 2.167.276.205 | 72,86 | | |
| | Persentase Kab/Kota yang memiliki | Persentase | 40 | 60 | 150 | | | | | |
| Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah | - Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim | Laporan | 1 | 1 | 100 | Rp 2.974.660.000 | Rp 2.167.276.205 | 72,86 | | |
| | - Laporan Fasilitasi Evaluasi AKIP | Laporan | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| | - Pergub Penyusunan Indikator Kinerja Utama | Pergub | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| | - Pergub Penyusunan Petunjuk Teknis | Pergub | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| | - Laporan Capaian Kinerja berdasarkan | Laporan | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| | - Jumlah PD yang terfasilitasi pelaksanaan SAKIP | PD | 38 | 38 | 100 | | | | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjnt / Solusi |
|---|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Reformasi Birokrasi | Persentase PD yang telah menjalankan langkah reformasi birokrasi | PD | 5% | 26% | 500 | Rp 2.691.105.000 | Rp 2.356.579.230 | 87,57 | | |
| Pelaksanaan Reformasi Peningkatan Kinerja Pemerintah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan - Jumlah PD yang difasilitasi - Jumlah Dokumen hasil evaluasi dan | Dokumen PD Dokumen | 1 38 1 | 1 38 1 | 100 100 100 | Rp 2.526.995.000 Rp 164.110.000 | Rp 2.254.718.450 Rp 101.860.780 | 89,23 62,07 | | |
| Program Peningkatan Penataan Administrasi | Persentase Laporan Administrasi jumlah dokumen Administrasi | Persentase Dokumen | 100% | 100 | 100 | Rp 127.960.000 | Rp 119.603.800 | 93,47 | | |
| Program Peningkatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan | Persentase OPD yang telah Jumlah Dokumen monev SPM | Persentase Dokumen | 50% | 50% | 100 | Rp 906.920.000 | Rp 847.923.559 | 93,49 | | |
| Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat Peningkatan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Survey yang direviu Jumlah Nominasi | Laporan Nominasi | 1 3 | 1 3 | 100 100 | Rp 224.960.000 Rp 190.000.000 | Rp 189.105.100 Rp 181.510.500 | 84,06 95,53 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjnt / Solusi |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---|--|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Pelayanan Tata Usaha Umum | Persentase pelayanan tata usaha umum yang sesuai SOP | Persentase | 95 | 95 | 100 | Rp 2.081.201.000 | Rp 1.769.504.785 | 85,02 | Kurangnya Kualitas SDM pada sehingga berdampak pada Kualitas Pelayanan pada Biro Umum | Memberikan Bimtek/Pelatihan untuk peningkatan SDM dalam rangka peningkatan Pelayanan |
| Pelayanan Administrasi Biro | Jumlah PNS yang dilayani | Orang | 190 | 190 | 100 | Rp 1.100.686.000 | Rp 986.417.399 | 98,62 | Anggaran masih belum tepat sasaran untuk peningkatan | Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan Pelayanan di Biro Umum |
| Pengelolaan Arsip dan Pelayanan Tata Usaha | Jumlah Arsip / Dokumen In aktif yang Jumlah Surat Pimpinan yang | Arsip / Dok Surat | 4000 1500 | 5000 2000 | 125 130 | Rp 593.215.000 Rp 387.300.000 | Rp 492.545.900 Rp 290.541.486 | 83,03 75,02 | Masih banyaknya | |
| Program Pelayanan Sarana | Persentase keterpenuhan sarana | Persentase | 95 | 95 | 100 | Rp 5.730.701.500 | Rp 4.516.178.598 | 78,81 | | |
| Pengelolaan Barang Aset Setda | Jumlah barang aset setda yang Dikelola | Aset / Barang | 6 | 6 | 100 | Rp 610.250.000 | Rp 296.909.870 | 48,65 | | |
| Pelayanan Rumah Tangga | Jumlah pelayanan rumah tangga | Pelayanan | 95 | 120 | 127 | Rp 5.120.451.500 | Rp 4.219.268.728 | 82,4 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjult / Solusi |
|---|--|-------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------|--------------|---|--|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan | Persentase ketercapaian target program/kegiatan keagamaan dan kesehatan | Persentase | 80 | 80 | 100 | Rp 2.351.000.000 | 2.077.134.583 | 83,89 | Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi, Pengendalian dan evaluasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat baik dilingkungan SKPD Pemprov. Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota | Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, Pengendalian dan evaluasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat baik dilingkungan SKPD Pemprov. Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan | Dokumen hasil koordinasi dan monev bidang keagamaan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | Rp 1.751.000.000 | 1.455.841.402 | 79,79 | Belum adanya kesatuan data untuk dibidang kesejahteraan | Mengupayakan kesatuan data untuk dibidang kesejahteraan rakyat |
| Koordinasi, Monitoring dan | Dokumen hasil koordinasi dan monev di | Dokumen | 12 | 12 | 100 | Rp 600.000.000 | 621.293.181 | 95,36 | Tidak meratanya | Melaksanakan pelatihan |
| Program Koordinasi, | Persentase ketercapaian target | Persentase | 80 | 80 | 100 | Rp 1.213.000.000 | 1.281.837.594 | 91,89 | Belum optimalnya | Mengoptimalkan peran |
| Koordinasi, Monitoring dan | Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | Rp 768.500.000 | 875.735.574 | 92,13 | | |
| Koordinasi, Monitoring dan | Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | Rp 240.000.000 | 222.538.240 | 92,72 | | |
| Koordinasi, Monitoring dan | Dokumen hasil koordinasi dan monev | Dokumen | 12 | 12 | 100 | Rp 204.500.000 | 183.563.780 | 89,76 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanj / Solusi |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Persentase | 80 | 80 | 100 | Rp 1.213.000.000 | 1.030.245.150 | 80,54 | | |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang kesejahteraan sosial | Dokumen | 12 | 12 | 100 | Rp 768.500.000 | 537.465.650 | 89,69 | | |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang kesejahteraan sosial | Dokumen | 12 | 12 | 100 | Rp 240.000.000 | 237.847.900 | 68,94 | | |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang kesejahteraan sosial | Dokumen | 12 | 12 | 100 | Rp 204.500.000 | 254.931.600 | 76,10 | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Hibah dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi | Persentase hibah bansos yang tepat | Persentase | 100 | 100 | 100 | 3.434.420.000 | 2.722.402.370 | 79,27 | | |
| Pelayanan Administrasi Hibah dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi | Jumlah Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial | Dokumen | 4 | 4 | 100 | 3.152.220.000 | 2.579.601.001 | 81,83 | | |
| Pelaksanaan Rapat Koordinasi | Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi | Dokumen | 1 | 1 | 100 | 174.800.000 | 140.251.369 | 80,24 | | |
| Penyusunan Perumusan Kebijakan | Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Bidang | Dokumen | 3 | 1 | 33 | 107.400.000 | 2.550.000 | 2,37 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindaklanjut / Solusi |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|---|--|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa | Persentase Kebijakan Bidang Industri dan Jasa yang ditindaklanjuti/terlaksana | Persentase | 100 | | | Rp 911.000.000 | Rp 905.463.543 | 99,39% | Rendahnya inflasi tahun ini dinilai positif karena penyebab inflasi tidak berasal dari turunnya daya beli masyarakat. Kaltim berhasil mengendalikan inflasi selama tahun 2019, hal ini karena upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah Kaltim yang berjalan efektif. | Melakukan intervensi pasar seperti gelar monitoring, operasi pasar mengatur tata kelola distribusi pada beberapa komoditas yang peningkatan harganya dapat mempengaruhi tingkat inflasi. |
| Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Rakor kebijakan perekonomian daerah | Dokumen | 3 | 3 | 100% | Rp 596.000.000 | Rp 595.540.547 | 99,92% | | |
| Koordinasi Kebijakan | Jumlah Dokumen koordinasi bidang | Dokumen | 1 | 1 | 100% | Rp 185.000.000 | Rp 183.729.733 | 99,31% | | |
| Peningkatan Koordinasi dan | Jumlah Dokumen hasil koordinasi bidang | Dokumen | 2 | 2 | 100% | Rp 130.000.000 | Rp 126.193.263 | 97,07% | | |
| Program Kebijakan | Persentase kebijakan | Persentase | 100 | | | Rp 768.000.000 | Rp 720.438.698 | 93,81% | | |
| Koordinasi Kebijakan Ekonomi | Jumlah Dokumen hasil koordinasi | Dokumen | 1 | 1 | 100% | Rp 320.500.000 | Rp 296.322.107 | 92,46% | | |
| Koordinasi Kebijakan | Jumlah Dokumen hasil koordinasi | Dokumen | 0 | 0 | 0 | Rp - | Rp - | - | | |
| Koordinasi Peningkatan | Jumlah Dokumen hasil koordinasi | Dokumen | 1 | 1 | 100% | Rp 384.000.000 | Rp 368.777.861 | 96,04% | | |
| Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung | Jumlah Dokumen hasil koordinasi Kebijakan peningkatan daya dukung | Dokumen | 1 | 1 | 100% | Rp 63.500.000 | Rp 55.338.730 | 87,15% | | |
| Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD | Persentase kebijakan peningkatan investasi daerah dan kinerja BUMD yang ditindaklanjuti/terlaksana | Persentase | 100 | | | Rp 1.449.300.000 | Rp 1.290.039.526 | 89,01% | | |
| Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Daerah | Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 100% | Rp 571.000.000 | Rp 560.781.645 | 98,21% | | |
| Koordinasi Kebijakan | Jumlah Dokumen kebijakan peningkatan | Dokumen | 3 | 2 | 80% | Rp 690.800.000 | Rp 543.198.816 | 78,63% | | |
| Koordinasi Promosi Sarana dan | Jumlah Dokumen hasil Promosi Sarana | Dokumen | 1 | 1 | 100% | Rp 187.500.000 | Rp 186.059.065 | 99,23% | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjnt / Solusi |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan | Persentase Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/terlaksana | | | | | | | | | |
| | | Persentase | 75 | 88 | 100 | Rp 853.000.000 | Rp 835.074.754 | 97,90 | | |
| Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 239.000.000 | Rp 231.050.300 | 96,67 | Belum optimalnya koordinasi bidang infrastruktur fisik dan bangunan | Perlu disusun rencana oprasional koordinasi yang efektif, efisien dan terukur |
| Koordinasi Pengembangan | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 474.500.000 | Rp 466.267.018 | 98,26 | | |
| Koordinasi Pengembangan | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 139.500.000 | Rp 137.757.436 | 98,75 | | |
| Program Koordinasi | Persentase Kebijakan Bidang | Persentase | 75 | 97 | 100 | Rp 874.500.000 | Rp 850.403.693 | 97,24 | | |
| Koordinasi Kebijakan Kawasan | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 192.000.000 | Rp 181.007.833 | 94,27 | | |
| Koordinasi Pengembangan | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 500.500.000 | Rp 494.347.350 | 98,77 | | |
| Koordinasi Kebijakan | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 182.000.000 | Rp 175.048.510 | 96,18 | | |
| Program Koordinasi Pengembangan Energi dan | Persentase kebijakan pengembangan energi dan sumber | Persentase | 75 | 87 | 100 | Rp 902.759.000 | Rp 876.218.662 | 97,06 | | |
| Koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi | Jumlah Dokumen hasil koordinasi kebijakan pengembangan energi | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 338.259.000 | Rp 329.797.021 | 97,50 | | |
| Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral | Jumlah Dokumen hasil koordinasi kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 564.500.000 | Rp 546.421.641 | 96,80 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjnt / Solusi |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program | Persentase rencana kerja anggaran sesuai ketentuan | Persentase | 100 | 100 | 100 | Rp 3.742.593.000 | Rp 3.408.690.403 | 91 | Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa | Meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikuti diklat/bimtek pengadaan |
| | Persentase pengendalian terhadap program/kegiatan SKPD | Persentase | 50 | 50 | 100 | | | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Perencanaan dan Pengendalian | Jumlah Dokumen hasil rapat koordinasi | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 364.710.000 | 296304425 | 81 | Belum adanya | Membuat sistem informasi |
| | Jumlah Dokumen Petunjuk teknis | Dokumen | 1 | 1 | 100 | Rp 2.771.483.000 | 2653250224 | 96 | Belum adanya | Membuat Juknis tentang |
| | Rencana Kerja Anggaran yang | RKA | 46 | 46 | 100 | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran | Dokumen | 1 | 1 | 100 | | | | | |
| Pengembangan Kebijakan | Jumlah Dokumen laporan Setda | Dokumen | 2 | 2 | 100 | Rp 606.400.000 | 459135754 | 76 | | |
| Program Koordinasi dan | Persentase permasalahan | Persentase | 70 | | | Rp 2.283.808.000 | Rp 1.641.374.446 | 70 | | |
| Monitoring dan Evaluasi APBD | Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD | Dokumen | 12 | 12 | 100 | Rp 838.808.000 | 524820768 | 63 | | |
| Monitoring dan Evaluasi Sektoral | Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi program/kegiatan Sektoral | Dokumen | 3 | 3 | 100 | Rp 841.500.000 | 631391988 | 75 | | |
| Administrasi dan Evaluasi Pembangunan | Jumlah Dokumen evaluasi pelaporan pembangunan | Dokumen | 3 | 3 | 100 | Rp 603.500.000 | 485161690 | 80 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjnt / Solusi |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Persentase layanan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu | Persentase | 100 | | | Rp 2.508.060.000 | Rp 2.061.783.196 | 100 | | |
| Evaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan | Jumlah SDM Pokja yang mengikuti pembinaan/peningkatan kapasitas aparatur | Orang | 5 | 5 | 100 | Rp 695.295.000 | Rp 544.215.886 | 78,27 | | |
| Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi Pengadaan | Jumlah pengadaan langsung yang dilayani | Pengadaan | 700 | 700 | 100 | Rp 768.300.000 | Rp 638.033.969 | 83,04 | | |
| | Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani | Pengadaan | 421 | 421 | 100 | Rp 1.044.465.000 | Rp 879.533.341 | 84,21 | | |
| | Jumlah pengadaan elektronik yang | Pengadaan | 700 | 700 | 100 | | | | | |
| Program Peningkatan dan Peningkatan Kerjasama antar | Persentase kerjasama yang | Persentase | 100 | 100 | 100 | Rp 2.319.100.000 | Rp 2.319.100.000 | 100 | Kualitas dan | Menambah SDM yang |
| Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama | Jumlah kerjasama antara pemerintah jumlah administrasi kerjasama yang terdokumentasi | Kerjasama / Dokumentasi | 20 | 20 | 100 | Rp 468.145.000 | Rp 468.145.000 | 100 | | |
| Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah | Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah | Kerjasama / | 20 | 20 | 100 | Rp 669.713.000 | Rp 669.713.000 | 100 | | |
| Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan | Persentase penurunan berita negatif daerah | Persentase | 5 | 5 | 100 | Rp 11.578.220.000 | Rp 11.578.220.000 | 100 | | |
| Kerjasama media | Jumlah kerjasama advertorial di media | Media Massa | 20 | 20 | 100 | Rp 605.000.000 | Rp 605.000.000 | 100 | | |
| Penyelenggaraan Peliputan dan Penyediaan Data dan Informasi | Jumlah berita yang terpublikasi di media | Berita | 1.000 | 1000 | 100 | Rp 10.388.709.000 | Rp 10.388.709.000 | 100 | | |
| | Jumlah laporan berupa data dan informasi yang di rilis | Laporan | 22 | 22 | 100 | Rp 584.511.000 | Rp 584.511.000 | 100 | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2019 | | | | | | Permasalahan | Tindakanjutt / Solusi |
|---|--|-------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | | | | |
| | | | | | | Pagu | Realisasi | % Capaian | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 12 | 13 |
| Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan | Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai SOP | | | | | | Rp 1.860.742.000 | 100 | | |
| | | Persentase | 90 | 90 | 100 | Rp 1.860.742.000 | | | | |
| Pelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan | Jumlah tamu pemprov yang dilayani | Tamu / Orang | 90 | 90 | 100 | Rp 607.721.000 | Rp 607.721.000 | 100 | | |
| Penatacaraan kegiatan Pemda | Jumlah Kegiatan Pemda yang dilakukan | Kegiatan | 100 | 100 | 100 | Rp 1.253.021.000 | Rp 1.253.021.000 | 100 | | |

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap Indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Per Menpan & RB Nomor 14 Tahun 2015, dimana jenis indikator yang dianalisis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

IKK Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/303/OTDA tanggal 24 Januari 2011.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah belum dapat diukur berdasarkan SPM/Standar Nasional, karena Sekretariat Daerah belum mempunyai SPM/ Standar Nasional dalam pemberian Pelayanan.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, dapat dilihat dalam tabel 2.2 pada lampiran dibawah ini.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----|----|---|----|-----------------------------|----|----|----|----|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Jumlah Biro yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001-2008 | | | Biro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Jumlah Biro yang Kelembagaannya Sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | | | Dokumen | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | a. Jumlah OPD/Biro yang Telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | | | Dokumen | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Perjanjian Kinerja (PK) OPD/Biro yang ditandatangani Gubernur tepat waktu | | | Dokumen | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | c. Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | | | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

RENCANA KERJA Tahun 2019

| No. | Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----|----|---|----|-----------------------------|----|----|----|----|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | yang ditandatangani oleh Gubernur tepat waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Jumlah OPD/Biro yang Melakukan input data pada e-sakip tepat waktu | | | OPD/Biro | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | e. Dokumen LKIP OPD/Biro yang disampaikan kepada Gubernur tepat waktu | | | Dokumen | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | f. LKIP Provinsi Kaltim disampaikan Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tepat waktu | | | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu isu yang sangat mendasar dan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2021 adalah adanya perubahan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagai tindak lanjut perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya perombakan struktur organisasi serta tupoksi yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan, mengingat hal tersebut membutuhkan proses serta penyesuaian, baik dari segi pekerjaan, anggaran maupun sumberdaya manusia.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.

Hasil Review terhadap Rancangan akhir RKPD, ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu:

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini otomatis menyebabkan ketidaksesuaian antara Rancangan Akhir RKPD dengan Rencana Kerja yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu dirasakan perlu adanya revisi dan kajian lebih lanjut guna menyesuaikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan kondisi yang ada saat ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah tidak ada yang berasal dari masyarakat karena Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah tidak ada yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, melainkan Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk melayani Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil pelaksanaan Musrenbang, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Bagian Pembangunan Kabupaten/Kota atau sebutan lain yang fungsi lembaganya berhubungan dengan hal tersebut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional;
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik;
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow fuction*;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam

mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim

Berdasarkan Misi Setda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tahun ke-1 dan ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Misi Pertama "Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, perbatasan, penataan wilayah, kerjasama, sosial dan kesejahteraan rakyat secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik ", dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip tata pemerintahan yang baik serta kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama,-
- (2) Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat,-
- (3) Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat,-

Misi Kedua " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan infrastruktur yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan ", dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

- (3) Mewujudkan sinegritas pembangunan infrastruktur yang merata dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Misi Ketiga " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, hubungan masyarakat dan umum secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel ", dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik ;
- (2) Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalme dalam meningkatkan citra positif pemerintah provinsi Kalimantan Timur

Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi secara tertib dan teratur.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah, rumusan Program dan Kegiatan tahun 2021 disusun berdasarkan pencapaian Visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur serta dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, terhadap program tidak ada perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD. Tetapi untuk kegiatan terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD yang disebabkan oleh :

1. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi.
2. Penyesuaian dengan perubahan SOTK di Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
3. Analisa Kebutuhan Operasional

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan sejenis. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah, dapat dilihat pada tabel lampiran dibawah ini.

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------|--|---|----------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | 173.211.976.000 | | | | 173.664.224.588 |
| 4.01 | Kesekretariatan Daerah | | | | 173.211.976.000 | | | | 173.664.224.588 |
| 4.01.03 | Sekretariat Daerah | | | | 173.211.976.000 | | | | 173.664.224.588 |
| 4.01.03.01 | Biro Umum | | | | 110.026.300.000 | | | | 110.026.300.000 |
| 4.01.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 70% | Kaltim | 23.600.770.000 | APBD | | 75 | 25.123.488.960 |
| 4.01.07.01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Kaltim | 23.600.770.000 | APBD | | 12 | 25.123.488.960 |
| 4.01.08 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu | 1 Unit | Kaltim | 56.505.530.000 | APBD | | 2 | 38.086.300.000 |
| 4.01.08.01 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor | 1 Unit | Kaltim | 36.290.580.000 | APBD | | | 14.705.800.000 |
| 4.01.08.02 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana | 12 Bulan | Kaltim | 20.214.950.000 | APBD | | | 23.380.500.000 |
| 4.01.09 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi | 60% | Kaltim | 21.617.718.500 | APBD | | 65 | 31.863.195.040 |
| 4.01.09.01 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah | 45 Kegiatan | Kaltim | 20.679.240.500 | APBD | | | 30.302.445.040 |
| 4.01.09.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi | 190 Orang | Kaltim | 938.478.000 | APBD | | | 1.560.750.000 |
| 4.01.12 | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai Akuntabilitas Kinerja PD | 70% | Kaltim | 770.575.000 | APBD | | 75 | 97.000.000 |
| 4.01.12.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran | 10 Dokumen | Kaltim | 80.000.000 | APBD | | | 22.000.000 |
| 4.01.12.02 | Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran | 18 Dokumen | Kaltim | 690.575.000 | APBD | | | 75.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|---|--|-----------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 4.01.30 | Program Pelayanan Tata Usaha Umum | jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum | 12 Bulan | Kaltim | 1.881.005.000 | APBD | | 4.594.841.000 | |
| 4.01.30.01 | Pelayanan Administrasi Biro | jumlah PNS | 190 orang | Kaltim | 900.490.000 | APBD | | 1.066.026.000 | |
| 4.01.30.02 | Pengelolaan Arsip dan Dokumen Setda | jumlah arsip/dokumen inaktif yang telah ditata dengan baik | 4000 Dokumen | Kaltim | 593.215.000 | APBD | | 625.300.000 | |
| 4.01.30.03 | Pelayanan Tata Usaha Pimpinan | Jumlah surat pimpinan yang terdistribusi tepat waktu | 1500 Dokumen | Kaltim | 387.300.000 | APBD | | 603.050.000 | |
| 4.01.30.04 | Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda | | | | | | | 1.807.165.000 | |
| 4.01.30.05 | Pelayanan Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda | | | | | | | 493.300.000 | |
| 4.01.40 | Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda | jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga | 190 Buah | Kaltim | 5.650.701.500 | APBD | 200 | 10.261.475.000 | |
| 4.01.40.01 | Pengelolaan Barang Aset Setda | Jumlah Gedung Aset Setda Yang Dikelola | 8 Gedung | Kaltim | 610.250.000 | APBD | 8 | 1.875.000.000 | |
| 4.01.40.02 | Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan | jumlah kegiatan pimpinan yang terlaksana dengan baik | 95 Acara | Kaltim | 5.040.451.500 | APBD | | 8.386.475.000 | |
| | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | | | | - | | | | |
| | pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | | | | | APBD | | | |
| | Program Pelayanan Acara-Acara Pemerintahan Provinsi dan Kegiatan Rumah Tangga Kepala | | | | - | | | | |
| | Pelayanan Kegiatan kerumahaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | | | | | APBD | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah | | | | - | | | | |
| | Inventarisasi Barang dan Aset Daerah | | | | | APBD | | | |
| 4.01.03.02 | Biro Hubungan Masyarakat | | | | 15.745.012.000 | | | 15.745.012.000 | |
| 4.01.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 85% | Kaltim | 1.407.700.000 | APBD | 90 | 2.316.503.360 | |
| 4.01.07.01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Kaltim | 1.407.700.000 | APBD | 12 | 2.316.503.360 | |
| 4.01.08 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu | 1 Unit | Kaltim | 478.800.000 | APBD | 2 | 270.500.000 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|----------------|---|---|----------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 4.01.08.01 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor | 10 Unit | Kaltim | 428.800.000 | APBD | | 11 | 210.000.000 |
| 4.01.08.02 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana | 10 Bulan | Kaltim | 50.000.000 | APBD | | 11 | 60.500.000 |
| 4.01.09 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi | 80% | Kaltim | 1.207.050.000 | APBD | | 85 | 1.704.500.000 |
| 4.01.09.01 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah | 10 Kegiatan | Kaltim | 978.550.000 | APBD | | 11 | 1.428.000.000 |
| 4.01.09.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kontribusi BIMTEK | 20 Kegiatan | Kaltim | 228.500.000 | APBD | | 22 | 276.500.000 |
| 4.01.12 | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai Akuntabilitas Kinerja PD | 73% | Kaltim | 60.000.000 | APBD | | 74 | 72.600.000 |
| 4.01.12.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | Dokumen perencanaan dan anggaran | 2 Dokumen | Kaltim | 10.000.000 | APBD | | 2 | 12.100.000 |
| 4.01.12.02 | Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran | 4 Dokumen | Kaltim | 50.000.000 | APBD | | 4 | 60.500.000 |
| 4.01.37 | Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama | Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti | 80% | Kaltim | 1.244.100.000 | APBD | | 5 | 1.372.155.550 |
| 4.01.37.01 | Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah | Laporan kerjasama dengan lembaga non perintah | 20 Laporan | Kaltim | 333.145.000 | APBD | | 22 | 358.700.000 |
| 4.01.37.02 | Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama | Jumlah Administrasi Kerjasama yang Terdokumentasi | 20 Laporan | Kaltim | 396.713.000 | APBD | | 22 | 435.622.730 |
| 4.01.37.03 | Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah | Laporan kerjasama antar perintah | 20 laporan | Kaltim | 514.242.000 | APBD | | 22 | 577.832.820 |
| 4.01.88 | Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan | Persentase Penurunan Berita Negatif | 5% | Kaltim | 9.821.620.000 | APBD | | 5 | 8.251.407.680 |
| 4.01.88.02 | Kerjasama media | Jumlah kerjasama media | 20 Media Massa | Kaltim | 476.000.000 | APBD | | 22 | 531.560.000 |
| 4.01.88.03 | Penyelenggaraan Peliputan dan Publikasi | Jumlah berita positif yang terpublikasi | 1000 Berita | Kaltim | 8.761.109.000 | APBD | | 1.100 | 7.056.989.370 |
| 4.01.88.04 | Penyediaan Data dan Informasi | Jumlah sistem penyedia data dan Informasi | 22 Sistem | Kaltim | 584.511.000 | APBD | | 24 | 662.858.310 |
| 4.01.90 | Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan | Persentase pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Keprotokolan | 90% | Kaltim | 1.525.742.000 | APBD | | 90 | 1.757.345.410 |
| 4.01.90.03 | Pelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan | Jumlah Tamu Pemda | 90 Instansi | Kaltim | 607.721.000 | APBD | | 99 | 690.940.000 |
| 4.01.90.04 | Penatacaraan kegiatan Pemda | Jumlah Kepenataacaraan kegiatan pemda yang terjadwalkan | 100 Kegiatan | Kaltim | 918.021.000 | APBD | | 110 | 1.066.405.410 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|---|---|-----------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Program Pengembangan data dan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik | | | | | | | | |
| | Publikasi dan Dokumentasi | | | | | APBD | | | |
| | Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik | | | | | APBD | | | |
| 4.01.03.03 | Biro Hukum | | | | 6.050.000.000 | | | | 5.363.820.588 |
| 4.01.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 75% | Kaltim | 475.400.000 | | | 80% | 498.085.120 |
| 4.01.07.01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Kaltim | 475.400.000 | APBD | | 12 | 498.085.120 |
| 4.01.08 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu | 1 unit | Kaltim | 255.400.000 | | | 3 | 182.585.468 |
| 4.01.08.01 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor | 0 Unit | Kaltim | 243.400.000 | APBD | | | 145.100.000 |
| 4.01.08.02 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor | 32 Unit | Kaltim | 12.000.000 | APBD | | | 37.485.468 |
| 4.01.09 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi | 50% | Kaltim | 571.500.000 | | | 60 | 226.250.000 |
| 4.01.09.01 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah | 15 Kegiatan | Kaltim | 545.000.000 | APBD | | | 201.250.000 |
| 4.01.09.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur | 1 Jumlah | Kaltim | 26.500.000 | APBD | | | 25.000.000 |
| 4.01.12 | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai Akuntabilitas Kinerja PD | 70% | Kaltim | 55.400.000 | | | 73 | 12.150.000 |
| 4.01.12.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | Dokumen perencanaan dan anggaran | 4 Dokumen | Kaltim | 5.400.000 | APBD | | | 6.500.000 |
| 4.01.12.02 | Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran | 10 Dokumen | Kaltim | 50.000.000 | APBD | | | 5.650.000 |
| 4.01.26 | Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah | Peraturan Daerah yang mendorong peningkatan perekonomian daerah (Perda) | 10 Perda | Kaltim | 691.000.000 | | | 10 | 878.750.000 |
| 4.01.26.01 | Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi | Terwujudnya Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 10 Perda | Kaltim | 691.000.000 | APBD | | 10 | 878.750.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------|--|--|------------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 4.01.03.03 | Biro Hukum | | | | 6.050.000.000 | | | | 5.363.820.588 |
| 4.01.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 75% | Kaltim | 475.400.000 | | | 80% | 498.085.120 |
| 4.01.07.01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Kaltim | 475.400.000 | APBD | | 12 | 498.085.120 |
| 4.01.29 | Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Persentase masyarakat yang memperoleh akses informasi hukum (%) | 60% | Kaltim | 200.000.000 | | | 65 | 300.000.000 |
| 4.01.29.01 | Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah | Terlaksananya Penyebar Luasan Publikasi Informasi Hukum | 660 Jumlah | Kaltim | 200.000.000 | APBD | | 660 | 300.000.000 |
| 4.01.32 | Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah | Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang ditetapkan | 250 Peraturan | Kaltim | 1.244.300.000 | | | 255 | 955.000.000 |
| 4.01.32.01 | Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota | Jumlah Fasilitasi, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota | 250 Produk Hukum | Kaltim | 1.244.300.000 | APBD | | 250 | 955.000.000 |
| 4.01.33 | Program Pelayanan Bantuan Hukum | Persentase kasus hukum yang diselesaikan | 90% | Kaltim | 1.840.000.000 | | | 90 | 1.050.000.000 |
| 4.01.33.01 | Peningkatan Palayanan Bantuan Hukum | Advice dan pertimbangan hukum Penyelesaian Sengketa yang diberikan kepada OPD/Masyarakat dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku | 90% | Kaltim | 1.610.000.000 | APBD | | | 800.000.000 |
| 4.01.33.02 | Peningkatan Penyelesaian Sengketa | Terpenuhinya Kepuasan masyarakat terhadap Kepastian Hukum, penyelesaian Perkara dengan cepat | 70% | Kaltim | 230.000.000 | APBD | | 73 | 250.000.000 |
| 4.01.36 | Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM | Persentase lembaga di Kabupaten/Kota Peduli HAM | 80% | Kaltim | 370.000.000 | | | 85 | 350.000.000 |
| 4.01.36.01 | Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM | Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Sadar akan Hukum dan HAM | 75% | Kaltim | 370.000.000 | APBD | | 80 | 350.000.000 |
| 4.01.45 | Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum | Peraturan Daerah yang diterapkan (Perda) | 10 Perda | Kaltim | - | | | 15 | 111.000.000 |
| 4.01.45.01 | Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan | Terwujudnya Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan | 10 Perda | Kaltim | - | | | 10 | 111.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------|--|---|----------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 4.01.03.04 | Biro Organisasi | | | | 9.521.792.000 | | | | 10.428.964.000 |
| 4.01.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 85% | Kaltim | 454.032.000 | | | | 728.701.000 |
| 4.01.07.01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Laporan Administrasi Perkantoran | 23 Laporan | Kaltim | 454.032.000 | APBD | | | 728.701.000 |
| 4.01.53.02 | Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah PD yang difasilitasi pembentukan kelompok Budaya Kerja | 38 PD | Kaltim | 164.110.000 | APBD | | | 200.000.000 |
| 4.01.60 | Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK) | 73% | Kaltim | 2.974.660.000 | | | | 1.865.830.000 |
| 4.01.60.01 | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah | Jumlah PD yang terfasilitasi pelaksanaan SAKIP | 38 PD | Kaltim | 2.974.660.000 | APBD | | | 1.470.000.000 |
| 4.01.60.04 | Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim | 1 Laporan | Kaltim | | | | | 395.830.000 |
| 4.01.80 | Program Penguatan Kelembagaan | Prosentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK | 87% | Kaltim | 1.145.920.000 | | | | 1.671.500.000 |
| 4.01.80.05 | Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi | Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi/evaluasi kelembagaan | 38 PD | Kaltim | 599.960.000 | | | | 676.500.000 |
| 4.01.80.07 | Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penguatan kelembagaan | 10 Kab/kota | Kaltim | 231.000.000 | | | | 550.000.000 |
| 4.01.80.08 | Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | Dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun | 1 dokumen | Kaltim | 314.960.000 | | | | 445.000.000 |
| 4.01.81 | Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan | 61% | Kaltim | 224.960.000 | | | | 600.000.000 |
| 4.01.81.02 | Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan | Jumlah SOP Perangkat Daerah yang diverifikasi | 1840 SOP | Kaltim | 224.960.000 | | | | 600.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------|--|--|----------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 4.01.03.05 | Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah | | | | 6.450.000.000 | | | 6.700.000.000 | |
| 4.01.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 75% | Kaltim | 1.205.300.000 | | | 1.012.265.250 | |
| 4.01.07.01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran | 12 Bulan | Kaltim | 1.205.300.000 | APBD | | 1.012.265.250 | |
| 4.01.27.11 | Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah | Jumlah penegasan Batas Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota Se Kalimantan timur secara jelas dan pasti | 5 Dokumen | Kaltim | 549.600.000 | APBD | | 405.934.000 | |
| 4.01.31 | Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan | Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti | 100% | Kaltim | 1.076.250.000 | | | 1.244.208.500 | |
| 4.01.31.04 | Penataan Masalah Pertanahan | Terwujudnya pelaksanaan Kebijakan Pertanahan, laporan Koordinasi Pertanahan | 1 Dokumen | Kaltim | 419.850.000 | APBD | | 469.833.500 | |
| 4.01.31.05 | Pembinaan Kamtibmas | Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Timur | 1 Dokumen | Kaltim | 656.400.000 | APBD | | 774.375.000 | |
| 4.01.34 | Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan | 100% | Kaltim | 919.800.000 | | | 1.113.467.000 | |
| 4.01.34.10 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | Laporan Koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1 Dokumen | Kaltim | 919.800.000 | APBD | | 1.113.467.000 | |
| 4.01.35 | Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah | Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Predikat LPPD "ST" | 50% | Kaltim | 541.700.000 | | | 596.800.000 | |
| 4.01.35.10 | Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan | 1 Dokumen | Kaltim | 541.700.000 | APBD | | 596.800.000 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------|--|--|----------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 4.01.03.06 | Biro Kesejahteraan Rakyat | | | | 9.839.200.000 | | | | 9.839.200.000 |
| 4.01.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 70% | Kaltim | 678.650.000 | | | | 871.050.000 |
| 4.01.07.01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Kaltim | 678.650.000 | APBD | | | 871.050.000 |
| 4.01.18.02 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kepemudaan dan Olahraga | 12 Dokumen | Kaltim | 240.000.000 | APBD | | | 324.000.000 |
| 4.01.18.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan | Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Perpustakaan dan Kearsipan | 12 Dokumen | Kaltim | 204.500.000 | | | | 274.100.000 |
| 4.01.19 | Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 80% | Kaltim | 1.007.000.000 | | | | 1.657.000.000 |
| 4.01.19.01 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang kesejahteraan sosial | 12 Dokumen | Kaltim | 400.000.000 | | | | 400.000.000 |
| 4.01.19.02 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang tenaga kerja dan transmigrasi | 12 Dokumen | Kaltim | 303.500.000 | APBD | | | 341.500.000 |
| 4.01.19.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12 Dokumen | Kaltim | 303.500.000 | APBD | | | 915.500.000 |
| 4.01.79 | Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat | Persentase hibah bansos yang tepat sasaran | 100% | Kaltim | 3.434.420.000 | | | | 2.597.175.000 |
| 4.01.79.01 | Pelayanan Administrasi Hibah dan Bantuan Sosial | Jumlah Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial yang tersusun | 4 Dokumen | Kaltim | 3.152.220.000 | | | | 2.261.450.000 |
| 4.01.79.02 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat | 1 Dokumen | Kaltim | 174.800.000 | | | | 202.725.000 |
| 4.01.79.03 | Penyusunan Perumusan Kebijakan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 3 Dokumen | Kaltim | 107.400.000 | | | | 133.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------|---|---|----------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 4.01.03.07 | Biro Perekonomian | | | | 3.250.000.000 | | | 3.960.397.000 | |
| 4.01.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 100% | Kaltim | 463.700.000 | | | 612.347.000 | |
| 4.01.07.01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Kaltim | 463.700.000 | APBD | | 612.347.000 | |
| 4.01.49 | Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD | Tersedianya Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah | 1 Kebijakan | Kaltim | 699.300.000 | | | 894.250.000 | |
| 4.01.49.01 | Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Daerah | Dokumen Kebijakan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Daerah | 1 Dokumen | Kaltim | 196.000.000 | | | 299.250.000 | |
| 4.01.49.03 | Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD | Jumlah koordinasi perusda dan lembaga keuangan | 1 Dokumen | Kaltim | 187.500.000 | | | 395.000.000 | |
| 4.01.49.04 | Koordinasi Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah | Bahan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah | 8 kali | Kaltim | 315.800.000 | | | 200.000.000 | |
| 4.01.50 | Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa | Persentase Kebijakan Bidang Industri dan Jasa yang Ditindaklanjuti/ Terlaksana | 6 Kebijakan | Kaltim | 670.000.000 | | | 812.950.000 | |
| 4.01.50.01 | Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah | Hasil Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi | 3 Laporan | Kaltim | 430.000.000 | | | 437.950.000 | |
| 4.01.50.02 | Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pariwisata dan Perhotelan | Koordinasi bidang pariwisata dan perhotelan | 1 kali | Kaltim | 110.000.000 | | | 190.000.000 | |
| 4.01.50.03 | Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi dan UKM | jumlah koordinasi dan pembinaan koperasi | 2 kali | Kaltim | 130.000.000 | | | 185.000.000 | |
| 4.01.03.08 | Biro Administrasi Pembangunan | | | | 8.100.000.000 | | | 7.100.531.000 | |
| 4.01.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 80% | Kaltim | 1.137.539.000 | | | 1.542.428.320 | |
| 4.01.07.01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Kaltim | 1.137.539.000 | APBD | | 1.542.428.320 | |
| 4.01.08 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu | 1 Unit | Kaltim | 542.300.000 | | | 324.900.000 | |
| 4.01.08.01 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor | 5 unit | Kaltim | 371.700.000 | APBD | | 194.500.000 | |
| 4.01.08.02 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Kendaraan, alat kantor | 15 Unit | Kaltim | 170.600.000 | APBD | | 130.400.000 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|-------------------|---|---|----------------|---------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 4.01.09 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja PD | 70% | Kaltim | 779.000.000 | | | 594.800.000 | |
| 4.01.09.01 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek | 12 Bulan | Kaltim | 729.000.000 | APBD | | 512.800.000 | |
| 4.01.09.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kontribusi BIMTEK | 20 Kegiatan | Kaltim | 50.000.000 | APBD | | 82.000.000 | |
| 4.01.47.03 | Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan | Dokumen Laporan Setda | 2 Dokumen | Kaltim | 326.400.000 | APBD | | 350.000.000 | |
| 4.01.03.09 | Biro Infrastruktur dan Sumber Daya | | | | 4.229.672.000 | | | 4.500.000.000 | |
| 4.01.07 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) | 75% | Kaltim | 481.072.000 | | | 460.100.000 | |
| 4.01.07.01 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Kaltim | 481.072.000 | APBD | | 460.100.000 | |
| 4.01.08 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu | 1 unit | Kaltim | 355.884.000 | | | 299.000.000 | |
| 4.01.08.01 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor | 1 Unit | Kaltim | 340.596.000 | APBD | | 249.000.000 | |
| 4.01.08.02 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana | 12 Bulan | Kaltim | 15.288.000 | APBD | | 50.000.000 | |
| 4.01.09 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi | 50% | Kaltim | 1.003.745.000 | | | 1.420.900.000 | |
| 4.01.09.01 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah | 14 Kegiatan | Kaltim | 1.003.745.000 | APBD | | 1.420.900.000 | |
| 4.01.67 | Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan | Persentase Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/terlaksana | 75% | Kaltim | 822.670.000 | | | 860.000.000 | |
| 4.01.67.01 | Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan | Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan | 1 Dokumen | Kaltim | 218.970.000 | APBD | | 260.000.000 | |
| 4.01.67.02 | Koordinasi Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum | Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pekerjaan umum | 1 Dokumen | Kaltim | 347.225.000 | APBD | | 340.000.000 | |
| 4.01.67.03 | Koordinasi Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman | Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman | 1 Dokumen | Kaltim | 256.475.000 | APBD | | 260.000.000 | |
| 4.01.68 | Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan | Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan yang ditindaklanjuti/ terlaksana | 75% | Kaltim | 870.835.000 | | | 860.000.000 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2021 | |
|------------|--|--|----------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Target Capaian | Lokasi | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 4.01.68.01 | Koordinasi Kebijakan Perencanaan Dasrah | Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri | 1 Dokumen | Kaltim | 120.000.000 | APBD | | - | |
| 4.01.68.02 | Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri | Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan | 1 Dokumen | Kaltim | 218.040.000 | APBD | | 300.000.000 | |
| 4.01.68.03 | Koordinasi Pengembangan Kawasan | Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah | 1 Dokumen | Kaltim | 344.755.000 | APBD | | 300.000.000 | |

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran- sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023. Program dan Kegiatan yang tertuang dimaksud harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu biro dan antar biro dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing- masing yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah lingkup Bappeda agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 masih belum sempurna terkait data- data yang dibutuhkan untuk

dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 belum lengkap.

- b. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen- dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis serta seminar- seminar tentang perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam musrenbang;
- c. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Biro-Biro dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- e. Menjadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun- tahun berikutnya.